

IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PADA PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk (STUDI KASUS: BANK BII CABANG UTAMA SURABAYA)

Andi Prasetyo
Universitas Negeri Surabaya
Email: andiprasetyo788@gmail.com

Abstract

This research aims to know how the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Surabaya Branch of Bank BII. Samples taking technique done by purposive sampling. Sample research is all the ranks of leaders in Surabaya Branch of Bank BII which includes twelve people, that will ensure the implementation of GCG in Surabaya Branch of Bank BII. The analytical method used is descriptive method with percentage. From these results, showing that the level of implementation of GCG in the Surabaya Main Branch of Bank BII at 94,07% which means has implemented the principles of GCG very well.

Keywords: Good Corporate Governance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Saat ini pengelolaan perusahaan di Indonesia masih tergolong dalam kondisi yang lemah. Bukti empiris yang diperoleh dari hasil riset Zhuang pada tahun 2000 menunjukkan masih lemahnya standar-standar akuntansi dan regulasi, pertanggungjawaban kepada para pemegang saham, standar-standar pengungkapan dan transparansi serta proses-proses kepengurusan perusahaan. Pernyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan masih lemahnya perusahaan perbankan di Indonesia dalam menjalankan manajemen yang baik dan memuaskan stakeholder perusahaan. Korporasi yang dibentuk dan entitas yang terpisah itu sendiri merupakan subyek hukum, sehingga keberadaan korporasi dan para pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) tersebut harus dilindungi melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Good Corporate Governance yang timbul di perusahaan berkaitan dengan *agency theory*. *Agency Theory* akan timbul karena adanya perilaku dari manajer/agen untuk bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak

lain/pemilik. Hal ini dapat terjadi karena manajer mempunyai informasi yang lengkap mengenai perusahaan, sedangkan informasi tersebut tidak dimiliki oleh pemilik perusahaan (dalam hal ini timbul *Asymmetric Information* atau *AI*). Hal ini diperkuat dengan pendapat yang dikembangkan oleh Michael Johnson:

“...memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai “*agents*” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.”.

Berbagai pemikiran mengenai *Good Corporate Governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. BUMS khususnya perbankan diwajibkan untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara konsisten atau menjadikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai, pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Salah satu perbankan milik swasta atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) dan juga menerapkan *Good Corporate Governance* adalah PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Bank Internasional Indonesia (BII) didirikan pada tanggal 15 Mei 1959. Bank BII diharapkan mampu mempertahankan keunggulan berbagai produk berbasis teknologi yang akan menjadi alat untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan sistem teknologi guna menciptakan kondisi lingkungan yang stabil dalam operasional bank sehari-hari, termasuk peningkatan pelayanan para nasabah. Setelah mendapatkan izin sebagai bank devisa pada tahun 1988, Bank BII mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia atau BEI) pada tanggal 21 November 1989 dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang lebih baik lagi.

Bank BII menerapkan *Good Corporate Governance* karena bank tersebut merupakan sumber pendanaan memfasilitasi pembiayaan kredit dan investasi untuk perusahaan baru baik skala besar, menengah dan kecil, selain untuk kegiatan ekspansi industri. Intinya, bank merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu, dengan adanya pengelolaan perbankan yang baik melalui aplikasi GCG maka hal ini akan meningkatnya efisiensi perbankan dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi mengingat perbankan mempunyai sumbangan besar dalam perekonomian. Jika perbankan efisien maka hal ini akan membawa dampak positif bagi peningkatan keuntungan bank, besaran dana intermediasi bank, membaiknya kualitas pelayanan kepada nasabah, mendorong keamanan operasional, kesehatan perbankan serta yang paling penting keuntungan kepada *shareholder* dan *stakeholder*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis mengambil judul “Implementasi *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk (Studi kasus: Bank BII Cabang Utama Surabaya)”.

Rumusan Masalah

Bagaimanakah implementasi *Good Corporate Governance* pada BII Cabang Utama Surabaya?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada BII Cabang Utama Surabaya yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Ada berbagai pengertian *Good Corporate Governance* yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
- b) *Centre for European Policy Studies* (CEPS), punya formula lain. GCG merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak, proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Sebagai catatan, hak di sini adalah hak seluruh *stakeholder*, bukan terbatas kepada *shareholder* saja. Hak adalah berbagai kekuatan yang dimiliki *stakeholder* secara individual untuk mempengaruhi manajemen. Proses, maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak tersebut. Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan *stakeholder* menerima informasi yang diperlukan seputar kegiatan perusahaan.
- c) Kelompok negara maju (OECD), mendefinisikan GCG sebagai cara-cara manajemen perusahaan bertanggungjawab kepada *shareholder*-nya. Para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi *shareholder* lainnya, karena itu fokus utama disini terkait dengan proses pengambilan keputusan dari perusahaan yang mengandung nilai-nilai *transparency*, *responsibility*, *accountability*, dan tentu saja *fairness*.
- d) *Good Corporate Governance* (Wahyudin,2008), adalah tata kelola atau struktur yang terdiri dari *stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer untuk menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.
- e) *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan (Idroes,2006), didiskripsikan sebagai suatu hubungan antara Dewan Komisaris, dewan direktur eksekutif, pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pemegang saham.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah struktur, sistem, dan proses pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk mendorong peningkatan kinerja suatu perusahaan dan melindungi kepentingan stakeholders.

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan kegiatan usahanya bank harus menganut prinsip keterbukaan (*transparency*), memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank (*accountability*), berpegang pada *prudential banking practices* dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggungjawab bank (*responsibility*), objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (*independency*), serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), dalam hubungan dengan prinsip tersebut bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Keterbukaan (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan, antara lain dengan cara:
 - 1) Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
 - 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (*risk management*), sistem pengawasan dan

pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan *GCG* serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.

- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
 - 4) Kebijakan bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
- b) Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif, dengan cara sebagai berikut:
- 1) Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
 - 2) Bank harus meyakini bahwa semua organ organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *GCG*.
 - 3) Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
 - 4) Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards andpunishment system*.
- c) Tanggung Jawab (*Responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, dengan cara:

- 1) Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
 - 2) Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- d) Independensi (*Independency*) yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
- 1) Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas daribenturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - 2) Bank dalam mengambil keputusan harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
- e) Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- 1) Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
 - 2) Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang baik merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi

internasional yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang. Menurut *Bassel Committee on Banking Supervision*, tujuan dan manfaat *good corporate governance* antara lain sebagai berikut:

- a) Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah
- b) Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalkan resiko.
- c) Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang
- d) Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, Direksi dan RUPS
- e) Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
- f) Menjaga *going concern* perusahaan

METODE PENELITIAN

Subjek dan Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* pada Bank BII Cabang Utama Surabaya yang beralamat di Wisma BII, Jalan Pemuda No. 60-70, Surabaya

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer, yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian berupa jawaban kuesioner dari responden.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jajaran Bank BII Cabang Utama Surabaya. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel yang dimaksud:

- a) Responden berasal dari jajaran pimpinan bank pada Cabang Utama Surabaya Bank BII.
- b) Reponden merupakan pihak-pihak yang akan memastikan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank BII Cabang Utama Surabaya.
- c) Berdasarkan kriteria tersebut dan kondisi yang ada pada Bank BII Cabang Utama Surabaya, maka responden dalam penelitian ini meliputi Dewan Komisaris, Komite-komite, Dewan Direksi, Divisi-divisi yang terkait dengan pelaksanaan GCG pada Bank BII Cabang Utama Surabaya. (Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, dan Biro Direksi), yang seluruhnya berjumlah 12 orang.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

Kuesioner yaitu suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap masalah penelitian yang dikaji. Dalam penelitian ini digunakan skala Likert 5 poin, dimana skor 5 untuk pilihan “Sangat setuju”, skor 4 untuk pilihan “Setuju”, skor 3 untuk pilihan ”Ragu-ragu”, skor 2 untuk pilihan ”Tidak setuju”, dan skor 1 untuk pilihan ”Sangat tidak setuju”.

Metode Pengolahan Data

- a) Tabulasi, mengelompokkan data yang diteliti kemudian disusun secara teratur dan selanjutnya dibuat dalam bentuk tabel.

- b) *Precessing* data, yaitu data yang telah ditabulasi kemudian diolah atau diproses dalam bentuk matematis dengan menggunakan model analisis yang telah ditentukan.
- c) Interpretasi data, yaitu data yang telah diproses dalam bentuk matematis akan dianalisis selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan cara memberikan penjelasan mengenai implementasi *Good Corporate Governance* pada Bank BII Cabang Utama Surabaya berdasarkan persentase jawaban responden pada masing-masing pernyataan dalam kuesioner yang dirumuskan sebagai berikut:

$$P = \frac{K}{n} \times 100\%$$

dimana:

- P = Persentase yang dihasilkan
- n = jumlah skor GCG yang diharapkan
- K = jumlah skor GCG yang diperoleh

Selanjutnya untuk mengukur tingkat implementasi GCG menurut Riduwan (2005:15), yakni dengan skala interval sebagai berikut:

- 81 - 100 (sangat baik)
- 61 - 80 (baik)
- 41 - 60 (cukup)
- 21 - 40 (lemah)
- 0 - 20 (sangat lemah)

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Data penelitian ini diperoleh dari hasil jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada 12 orang responden pada Bank BII Cabang Utama Surabaya. Deskripsi mengenai pembagian dan pengembalian kuesioner penelitian ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.Deskripsi Pembagian dan Pengembalian Kuesioner

No.	Uraian	Jumlah (rangkap)	Persentase (%)
1.	Kuesioner yang dibagi	12	100
2.	Kuesioner yang tidak kembali	3	25
3.	Kuesioner yang kembali	9	75
4.	Kuesioner yang tidak dapat dianalisis	-	0

Sumber: Bank BII Cabang Utama Surabaya (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kuesioner yang kembali pada responden cukup tinggi yaitu sebesar 75%.Tabel di bawah ini menjelaskan rincian jawaban responden.

**Tabel 2.Jawaban Responden atas ImplementasiPrinsip Keterbukaan
(*transparency*)pada Bank BII Cabang Utama Surabaya**

Item Pertanyaan	Jawaban responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1. Bank mengungkapkan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> bank dan media secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan (<i>stakeholders</i>) sesuai dengan haknya	Sangat Setuju	5	55,6
	Setuju	4	44,4
	Ragu-Ragu	0	0
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat tidak setuju	0	0
2. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.	Sangat Setuju	7	77,8
	Setuju	2	22,2
	Ragu-Ragu	0	0
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat tidak setuju	0	0
3. Kebijakan bank telah tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan (<i>stakeholders</i>) dan yang berhak memperoleh informasi tentang	Sangat Setuju	5	55,6
	Setuju	4	44,4
	Ragu-Ragu	0	0
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat tidak setuju	0	0

kebijakan tersebut.			
4. Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) telah disajikan secara lengkap, akurat, kini, dan telah disampaikan tepat waktu kepada <i>shareholder</i> (pemegang saham) dan pihak-pihak berkepentingan (<i>stakeholders</i>) sesuai ketentuan yang berlaku.	Sangat Setuju	6	66,7
	Setuju	3	33,3
	Ragu-Ragu	0	0
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat tidak setuju	0	0
5. Bank menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.	Sangat Setuju	7	77,8
	Setuju	2	22,2
	Ragu-Ragu	0	0
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat tidak setuju	0	0
Sumber: Bank BII Cabang Utama Surabaya (diolah)			

Berdasarkan tabel data kuesioner mengenai prinsip keterbukaan (*transparency*) yang terdiri atas 5 item pernyataan kepada 9 orang responden, maka besarnya tingkat implementasi prinsip keterbukaan (*transparency*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya dapat dihitung sebagai berikut:

$$P = \frac{210}{9 \times 5 \times 5} \times 100\% = \frac{210}{225} \times 100\% = 93,33\%$$

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat implementasi prinsip keterbukaan (*transparency*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya adalah sebesar 93,33%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dapat dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81% - 100%.

Tabel 3. Jawaban Responden atas Implementasi Prinsip Akuntabilitas (*accountability*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya

Item Pertanyaan	Jawaban responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1. Bank telah menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing jajaran yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi bank.	Sangat Setuju	8	88,9
	Setuju	1	11,1
	Ragu-Ragu	0	6
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat tidak setuju	0	0
2. Seluruh jajaran bank mempunyai	Sangat Setuju	5	55,6

kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG).	Setuju	4	44,4
	Ragu-Ragu	0	0
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat tidak setuju	0	0
3. Bank memiliki ukuran kinerja dari seluruh jajaran bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai perusahaan (<i>corporate values</i>), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki sistem pemberian penghargaan dan sanksi (<i>reward and punishment system</i>).	Sangat Setuju	7	77,8
	Setuju	2	22,2
	Ragu-Ragu	0	6
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat tidak setuju	0	0
4. Seluruh jajaran bank menjalankan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam setiap kegiatan usaha bank.	Sangat Setuju	7	77,8
	Setuju	2	22,2
	Ragu-Ragu	0	6
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat tidak setuju	0	0

Sumber: Bank BII Cabang Utama Surabaya (diolah)

Berdasarkan tabel data kuesioner mengenai prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang terdiri atas 4 item pernyataan kepada 9 orang responden, maka besarnya tingkat implementasi prinsip akuntabilitas (*accountability*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya dapat dihitung sebagai berikut:

$$P = \frac{171}{9 \times 5 \times 4} \times 100\% = \frac{171}{180} \times 100\% = 95\%$$

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat implementasi prinsip akuntabilitas (*accountability*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya adalah sebesar 95%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dapat dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81% - 100%.

Tabel 4. Jawaban Responden atas Implementasi Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya

Item Pertanyaan	Jawaban responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank berpegang pada prinsip kehati-hatian (<i>prudential banking practices</i>) dan menjamin	Sangat Setuju	6	66,7
	Setuju	3	33,3
	Ragu-Ragu	0	0
	Tidak Setuju	0	0

dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.	Sangat tidak setuju	0	0
2. Bank memiliki Pedoman, Sistem, dan Prosedur Kerja seluruh tingkatan atau jenjang organisasi bank yang tersedia secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku	Sangat Setuju	8	88,9
	Setuju	1	11,1
	Ragu-Ragu	0	0
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat tidak setuju	0	0
3. Bank telah bertindak sebagai warga perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Citizen/GCC</i>) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	Sangat Setuju	6	66,7
	Setuju	3	33,3
	Ragu-Ragu	0	0
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat tidak setuju	0	0

Sumber: Bank BII Cabang Utama Surabaya (diolah)

Berdasarkan tabel data kuesioner mengenai prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) yang terdiri atas 3 item pernyataan kepada 9 orang responden, maka besarnya tingkat implementasi prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya dapat dihitung sebagai berikut:

$$P = \frac{128}{9 \times 5 \times 3} \times 100\% = \frac{128}{135} \times 100\% = 94,81\%$$

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat implementasi prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya sebesar 94,81%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dapat dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81% - 100%.

Tabel 5. Jawaban Responden atas Implementasi Prinsip Independensi (*independency*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya

Item Pertanyaan	Jawaban responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1. Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat seluruh jajaran bank.	Sangat Setuju	8	88,9
	Setuju	1	11,1
	Ragu-Ragu	0	0
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat tidak setuju	0	0
2. Seluruh jajaran bank dapat	Sangat Setuju	5	55,6

mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.	Setuju	4	44,4
	Ragu-Ragu	0	0
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat tidak setuju	0	0
3. Bank mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan, dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasi dan didokumentasi dengan baik.	Sangat Setuju	5	55,6
	Setuju	4	44,4
	Ragu-Ragu	0	0
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat tidak setuju	0	0

Sumber: Bank BII Cabang Utama Surabaya (diolah)

Berdasarkan tabel data kuesioner mengenai prinsip independensi (*independency*) yang terdiri atas 3 item pernyataan kepada 9 orang responden, maka besarnya tingkat implementasi prinsip independensi (*independency*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya dapat dihitung sebagai berikut:

$$P = \frac{126}{9 \times 5 \times 3} \times 100\% = \frac{126}{135} \times 100\% = 93,33\%$$

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat implementasi prinsip independensi (*independency*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya adalah sebesar 93,33%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dapat dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81% - 100%.

Tabel 6. Jawaban Responden atas Implementasi Prinsip Kewajaran (*fairness*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya

Item Pertanyaan	Jawaban responden	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
1. Bank senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pihak-pihak berkepentingan (<i>stakeholders</i>) berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (<i>equal treatment</i>).	Sangat Setuju	6	66,7
	Setuju	3	33,3
	Ragu-Ragu	0	0
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat tidak setuju	0	0
2. Bank memberikan kesempatan kepada seluruh pihak-pihak berkepentingan (<i>stakeholders</i>) untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.	Sangat Setuju	6	66,7
	Setuju	3	33,3
	Ragu-Ragu	0	0
	Tidak Setuju	0	0
	Sangat tidak setuju	0	0
3. Etika Kerja /Etika Bisnis telah dibuat	Sangat Setuju	7	77,8

dan disebarluaskan serta dilakukan	Setuju	2	22,2
evaluasi terhadap penerapannya untuk	Ragu-Ragu	0	0
menjaga hubungan dengan pihak lain	Tidak Setuju	0	0
baik dengan pemegang saham, kreditor, nasabah maupun dengan <i>stakeholders</i> lainnya.	Sangat tidak setuju	0	0

Sumber: Bank BII Cabang Utama Surabaya (diolah)

Berdasarkan tabel data kuesioner mengenai prinsip kewajaran (*fairness*) yang terdiri atas 3 item pernyataan kepada 9 orang responden, maka besarnya tingkat implementasi prinsip kewajaran (*fairness*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya dapat dihitung sebagai berikut:

$$P = \frac{127}{9 \times 5 \times 3} \times 100\% = \frac{127}{135} \times 100\% = 94,07\%$$

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat implementasi prinsip kewajaran (*fairness*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya adalah sebesar 94,07%. Tingkat persentase ini menurut aturan Likert dapat dikategorikan sangat baik karena berada pada skala interval 81% - 100%.

Berdasarkan data-data keseluruhan yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden, maka diperoleh pernyataan responden mengenai implementasi prinsip-prinsip GCG sehingga dapat dijawab permasalahan yang diajukan mengenai bagaimanakah implementasi GCG pada Bank BII Cabang Utama Surabaya.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, maka tingkat implementasi GCG pada Bank BII Cabang Utama Surabaya dapat dihitung sebagai berikut:

$$P = \frac{762}{9 \times 5 \times 18} \times 100\% = \frac{762}{810} \times 100\% = 94,07\%$$

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat implementasi prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran pada

Bank BII Cabang Utama Surabaya sebesar 94,07%. Tingkat persentase ini menurut ukuran Likert dapat dikategorikan sangat baik, karena berada pada skala interval 81%-100%.

KESIMPULAN

Upaya untuk mencapai kinerja yang optimal, Bank BII Cabang Utama Surabaya telah mengimplementasikan *Good Corporate Governance* dengan sangat baik, itu terbukti dari hasil perhitungan di dalam pembahasan menunjukkan bahwa tingkat implementasi GCG pada Bank BII Cabang Utama Surabaya sebesar 94,07%, sehingga spirit dari prinsip-prinsip GCG memang tercermin dalam aktivitas jajarannya sehari-hari.

Hal ini meliputi keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan mengenai bank. Tingkat implementasi prinsip keterbukaan (*transparency*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya adalah sebesar 93,33% yang dapat disimpulkan dalam praktek keterbukaan ini telah dilakukan secara optimal dalam publikasi informasi mengenai bank baik melalui *homepage* bank maupun melalui media. Informasi ini meliputi informasi keuangan dan non keuangan. Adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ bank mengindikasikan terlaksananya prinsip akuntabilitas dengan baik (dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat implementasi prinsip akuntabilitas pada Bank BII Cabang Utama Surabaya sebesar 95%), karena segenap jajaran bank telah memahami perannya dengan baik dalam pelaksanaan GCG. Prinsip akuntabilitas ini merupakan ekspresi dari prinsip pertanggungjawaban. Apabila suatu fungsi dan tugas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat, hasil kerja tersebut dengan mudah dipertanggungjawabkan hasilnya.

Prinsip pertanggungjawaban ini tercermin dalam pengelolaan bank yang senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Prinsip ini diwujudkan melalui tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memelihara lingkungan bisnis yang sehat, itu terbukti dari hasil perhitungan

menunjukkan bahwa tingkat implementasi prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya sebesar 94,81%. Pengelolaan bank secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun mengindikasikan terlaksananya prinsip independensi dengan baik pula (hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat implementasi prinsip independensi (*independency*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya sebesar 93,33%). Prinsip ini diwujudkan dalam menjalankan tugas dimana jajaran bank dituntut untuk mendahulukan kepentingan dan usaha bank di atas kepentingan pribadi. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat implementasi prinsip kewajaran (*fairness*) pada Bank BII Cabang Utama Surabaya sebesar 94,07%. Hal ini menandakan bank senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat pedoman etika usaha/etika kerja, yang merupakan norma-norma untuk mengatur hubungan antara bank dengan *stakeholders*. Adanya pedoman ini diharapkan akan membantu mereduksi potensi konflik antara bank dengan *stakeholders* dan antar karyawan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank BII Cabang Utama Surabaya secara keseluruhan telah mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, 2006, '*Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum*', viewed 1 agustus 2012, (www.bi.go.id)
- Bank Indonesia, 2006, '*Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum*', viewed 1 agustus 2012, (www.bi.go.id)
- Herwidayatmo, 2000, '*Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia*', viewed 18 Juli 2012, (<http://muharieffendi.files.wordpress.com/2007/11/file110-xxix-oktober-200-lmfeui.pdf>)
- Hesti, Puryanti, 2010, '*Agency Theory*', viewed 16 juli 2012, (<http://www.scribd.com/doc/36571575/Agency-Theory>)
- Idroes, Fery N, 2006, *Manajemen Risiko Perbankan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Kurniati, Yulia, 2008, '*Analisis Pengaruh Pelaksanaan Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Pelayanan Pemberian Kredit*', viewed 4 juli 2012, (<http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/18464/H08yku.pdf>)
- Mustika, Dyah 2005, '*Krisis Ekonomi 1997 Menumbuhkan GCG Di Indonesia*', viewed 31 juli 2012, (http://www.baepam.go.id/old/layanan/warta/2005_maret/GCG.pdf)
- Riduwan, 2005, '*Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*', Alfabeta, Bandung
- Riduwan, 2007, *Metode Penelitian untuk Tesis*, Alfabeta, Bandung
- Sari, Irmala, 2010, '*Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan Nasional*' (studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2006-2008) viewed 27 juli 2012 (http://eprints.undip.ac.id/23130/1/SKRIPSI_IRMALA_SARI.pdf)
- Sulistiyanto, Sri dan Haris Wibisono, 2003. '*Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia*', viewed 4 juli 2012 (<http://researchengines.com/hsulistiyanto3.html>)
- Susilo, Leo J dan Karlen Simarmata, 2007, '*Good Corporate Governance pada Bank: Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris dalam Melaksanakannya*', PT Hikayat Dunia, Jakarta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2003, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Penerbit Balaiung & Co, Yogyakarta
- Triyani, Yulinar, 2000, '*Manfaat Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Umum Pegadaian*', viewed 28 juli 2012

(http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_21205364.pdf)

www.bii.co.id

Zarkasyi, Moh. Wahyudin, 2008, Good Corporate Governance, Alfabeta, Bandung